KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Laka lantas tewaskan 6 orang, DPR sarankan izin truk tak laik jalan dicabut
Tanggal : Rabu, 04 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Laka Lantas Tewaskan 6 Orang

DPR Sarankan Izin Truk Tak Laik Jalan Dicabut

FOTO: RM ID



Sudjatmiko

SENAYAN menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan maut truk molen yang menewaskan enam warga di Jalan Cut Mutia, Rawahumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Penyebab kecelakaan perlu diusut secara menyeluruh, termasuk apakah kendaraan tersebut benar-benar laik jalan dan telah menjalani pemeriksaan rutin sebelum beroperasi.

Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko meminta aparat kepolisian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menggelar investigasi secara menyeluruh atas insiden kecelakaan maut truk molen yang menewaskan enam warga. Pengusutan tuntas diharapkan tidak berhenti pada alasan rem blong semata, melainkan juga menyasar kelaikan jalan hingga izin operasional armada. "Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, perlu ada penegakan hukum dan sanksi tegas," tegas Sudjatmiko di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas melibatkan truk molen bermuatan semen di Jalan Cut Mutia, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (1/11/26). Peristiwa tersebut menewaskan enam orang dan menyebabkan enam lainnya luka-luka. Kecelakaan bermula ketika truk molen bernomor polisi B 9548 MV melaju dari arah timur menuju barat. Berdasarkan keterangan awal sejumlah saksi, kendaraan tersebut kemudian memasuki jalan menurun di sekitar lokasi.

Saat melintasi turunan, truk diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Pengemudi sempat berusaha membanting setir ke arah tembok pembatas antara Kampus BSI dan Jalan Cut Mutia. Namun, truk diduga sudah kehilangan kendali hingga menghantam sejumlah orang yang sedang menunggu transportasi umum di depan gerbang kampus.

Seluruh korban kemudian dievakuasi ke tiga rumah sakit di Kota Bekasi, yakni RS Siloam, RSUD Kota Bekasi, dan RS Juwita. Korban luka mendapatkan penanganan medis, sedangkan korban meninggal dunia dibawa untuk proses penanganan lebih lanjut.

Sudjatmiko melanjutkan, mesti ada pemeriksaan rutin sebelum kendaraan diberangkatkan. Bila ada komponen yang tidak berfungsi pada kendaraan berat, risikonya bukan hanya bagi sopir, tetapi juga seluruh pengguna jalan. "Kami meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kemenhub dan Pemkot Bekasi memeriksa dokumen administrasi uji berkala (KIR) kendaraan serta izin operasional perusahaan pemilik truk," desak politisi PKB ini.

Menurutnya, pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang berbobot besar mesti diperketat tanpa ada kompromi di lapangan. ■ TIF